

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada proses perencanaannya program rusunawa sangat memikirkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para penerima manfaat program. program rusunawa juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga penghuni rusunawa yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga penghuni rusun. Program pelatihan keterampilan bagi para penghuni rusun diharapkan mampu memunculkan potensi diri dan meningkatkan keterampilan para penghuni rusun. Pelatihan keterampilan yang disusun oleh Pemprov DKI disesuaikan dengan pengajuan pelatihan yang diajukan oleh Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS). Dengan pelatihan yang diberikan diharapkan keterampilan penghuni rusun akan meningkat dan mampu mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Selain itu, pelatihan tersebut juga ditujukan untuk merubah pola pikir warga rusun untuk berani menjadi pengusaha. Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) turut membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan mendorong warga rusun untuk merintis UMKM guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Perencanaan program rusunawa juga berorientasi pada masa depan, penyelenggaraan rumah susun juga memiliki tujuan menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada dasarnya menekankan keberlangsungan lingkungan dan ruang hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan turut membantu menjamin ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perencanaan pembangunan rusunawa akan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan menjaga serta meningkatkan kelestarian lingkungan.

107

Muhammad Rizaldy Fauzi Rachman, 2025

*POLITIK PEMBANGUNAN PROGRAM RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI DKI JAKARTA. Studi pada Perencanaan, Politik Anggaran, dan Implementasi*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Selanjutnya keputusan yang dibuat dalam perencanaannya berkesesuaian dengan tujuan program itu sendiri. Dimulai dengan perencanaan hunian yang modern dan layak untuk ditempati. Kemudian perencanaan fasilitas yang mendukung ruang komunal dan ruang sosial yang baik. Adanya pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada tujuan penyediaan hunian layak serta peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga rusunawa. Selain itu keputusan untuk lokasi pembangunan yang strategis juga sejalan dengan tujuan awal untuk memberikasn kemudahan aksesibilitas bagi warga rusun untuk bekerja dan bersekolah.

Perencanaan yang dilakukan juga sangat komprehensif melibatkan berbagai instansi dan stakeholder. Pada proses perencanaan pembangunan rusunawa selalu melibatkan banyak pihak atau stakeholder, bukan hanya DPRD. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui bidang Perumahan menjelaskan bahwa Proses perencanaan tentunya melibatkan berbagai stakeholder. Dimulai dengan pengadaan jasa konsultansi yang diproses di BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dalam proses penyusunan DED melibatkan SKPD seperti: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stau Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam proses penerbitan KRK (Keterangan Rencana Kota), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penerbitan rekomtek PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam pengukuran dan rekomendasi Peil Lantai Bangunan dan Kajian Pengelolaan Air Hujan, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam akses jalan menuju rusun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam penerbitan Andalalin (Analisa Dampak Lalu Lintas) serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam penerbitan izin lingkungan. Pihak masyarakat dilibatkan dalam proses perizinan dan dalam penyusunan dampak lingkungan.

Dalam hal politik anggaran terjadi interaksi kepentingan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal program rusunawa terjadi interaksi intens antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan

Komisi D DPRD. DPRD lewat komisi-komisinya akan melaksanakan rapat dengan dinas-dinas atau mitra-mitranya. Setiap dinas sejatinya juga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Dalam hal pembangunan Rusunawa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta akan membahas bersama Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada rapat komisi antara Komisi D dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibahas secara menyeluruh program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik dari segi pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan, serta pengadaan barang atau jasa pada rusunawa.

Terdapat kepentingan politik dan kosntitusional bagi DPRD untuk mengusulkan lokasi pembangunan rusunawa berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing. Kepentingan ini sah secara hukum dan menjadi bagian dari fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Selain dapat mengusulkan lokasi pembangunan rusunawa, DPRD juga dapat menolak usulan anggaran yang diajukan Dinas atau menegosiasikan anggaran yang dihapus oleh Dinas. Interaksi DPRD dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam politik anggaran tidak hanya terkait proses anggaran pembangunan rusunawa saja, tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang untuk rusunawa itu sendiri. Pengajuan anggaran pengadaan barang perlu melewati persetujuan dari DPRD. Kembali akan dibahas melalui rapat Komisi D dan akan melewati negosiasi dengan DPRD. Pengadaan barang ini negosiasinya tidak kalah dengan negosiasi pembangunan rusunawa, terlebih detail pengadaan barang sangat terlihat jelas.

Pada implementasinya komunikasi yang dilakukan Dinas dalam mempromosikan rusunawa sangat minim. Warga yang menjadi calon penerima atau target sasaran program tidak tercakup dalam prosmosi yang dilakukan melalui media sosial. Sementara dari segi sumberdaya manusia, pelayanan yang diberikan sangat baik dan warga rusunawa puas akan kinerja pelayanan petugas rusunawa.

109

**Muhammad Rizaldy Fauzi Rachman, 2025**

***POLITIK PEMBANGUNAN PROGRAM RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI DKI JAKARTA. Studi pada Perencanaan, Politik Anggaran, dan Implementasi***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pada keberadaan fasilitas sejatinya fasilitas masih belum terpenuhi dan berjalan seriring waktu. Pengajuan fasilitas diajukan oleh pihak UPRS kepada Dinas PRKP. Hal ini juga menyangkut kewenangan UPRS yang hanya dapat mengajukan karena anggaran pengadaan barang seluruhnya berada di Dinas PRKP. Dalam hal disposisi, Dinas PRKP telah memberi kemudahan dalam hal pendaftaran maupun pembayaran sewa rusunawa, melalui aplikasi Sirukim kemudahan itu telah dihadirkan sehingga tidak memerlukan birokrasi yang berbelit.

## **B. Saran**

### **B. 1 Saran Teoritis**

Berdasarkan teori Perencanaan yang dikemukakan Friedman, sebuah perencanaan haruslah komprehensif melibatkan berbagai stakeholder. Pada program rusunawa ini sejatinya banyak sekali stakeholder yang terlibat. Akan tetapi terdapat masalah tendering yang berkaitan dengan kerjasama antar stakeholder. Maka dari itu sinergitas antar stakeholder perlu lebih dikuatkan, selain itu perlu adanya sinkronisasi aturan terkait penyelenggaraan tendering sehingga antar stakeholder selaras dalam mengimplementasikan program rusunawa ini. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran perlu lebih diperbanyak. Keterlibatan masyarakat terlihat sangat minim, bahkan usulan musrenbang terkait rusunawa sangat minim. Perlu adanya keterlibatan masyarakat terutama lembaga masyarakat terkait perumahan dan tata kota.

Selanjutnya pada teori implementasi perlu adanya komunikasi yang baik dari implementator, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu lebih melakukan sosialisasi dan promosi atas program rusunawa ini kepada warga yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu Dinas PRKP juga perlu melakukan survei terhadap MBR agar penentuan lokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan MBR yang ada disekitar wilayah pembangunan rusunawa nantinya.

## **B. 2 Saran Praktis**

Kebermanfaatan rusunawa telah banyak dirasakan oleh para penghuni rusunawa, program rusunawa ini harus sangat diprioritaskan dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau. Alokasi APBD Pemprov DKI harus lebih banyak lagi dialokasikan untuk pembangunan rusunawa karena manfaatnya terasa dan tepat sasaran. Meski begitu perlu ada peningkatan terhadap fasilitas pendukung, bukan hanya anggaran pembangunan tapi Pemprov juga perlu terlebih dahulu meningkatkan pembangunan fasilitas pendukung di setiap rusunawa.

Kemudian dalam hal pembatasan masa tinggal penghuni rusunawa perlu ada kajian lebih mendalam karena tidak semua penghuni rusun meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Perlu selektif dalam menyetujui perpanjangan masa tinggal penghuni. Pihak UPRS dan verifikator harus melihat peningkatan kesejahteraan warga, sehingga warga yang penghasilannya telah meningkat dan mampu mengontrak atau membeli rumah tapak yang layak apat tidak diperpanjang masa penghuniannya sehingga akan terjadi siklus penghunian dan mengurai antrean pendaftar hunian rusunawa.